

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Agustina, Rosa, dan Hijma, Jaap, dan Nieuwenhuis, Hans, dan Suharnoko, 2012, *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dewi.J, Sonny, 2015, *Harta Benda Perkawinan : Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami Istri atas Kepemilikan Harta Benda Dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung.
- Hartanto, J.Andy, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan : Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Hasbullah, Frieda Husni, 2009, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 2*, CV Indhill Co, Jakarta
- Martono, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Nainggolan, Bernard 2011, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, PT. Alumni, Bandung.
- Prawirohamidjojo, R.Soetojo, 1990, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Prawirohamidjojo, R.S., 1998, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Satrio,J., 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satrio, J., 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satrio, J., 1999, *Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung.
- Setiawan, R, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Subekti, 1989, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Susanto, Happy, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta.

### **Jurnal, Karya Ilmiah, Paper**

Aulia, G. P., Kawuryan, E.S., “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Cessie dalam Melakukan Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Bangunan”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Januari, 2018.

Darmani, Ninik, dan Dewi, M.P, dan Hernawan, Ari, dan Innaka, R.A.A, dan Rahman, T.E, dan, “Asas Kebebasan Bekontrak dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsorcing”, *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 3, Oktober, 2011.

Erawati, Elly dan Budiono, Herlien, “Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian”, 2010, Nasional Legal Reform Program, Jakarta,

Faradz, Haedah, “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 Nomor 3, September, 2008.

Herawati, Fitria, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Terjadinya Pembatalan Perjanjian Perkawinan : Kasus Pembatalan Perjanjian Perkawinan Oleh Suami”, Tesis, Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia”, 2003, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Pramono, Nindyo, “Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian”, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2, Juni, 2010.

Purnamasari, Irma Devita, “Sahkan Perjanjian Kawin yang Tak Didaftarkan ke Pengadilan?”,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt525dffe353c5e/s>

[ahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan](#), diakses pada 26 Oktober 2019.

- Puspitasari, Zuhro, 2014, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Perbankan Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Baku (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, Skripsi, (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).
- Sinaga, N.A, “Peranan Azas-Azas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, Binamulia Hukum, Volume 7, Nomor 2, Desember, 2018.
- Soentoro, Tegoeh, 2006, “Pembatalan Akta Perjanjian Kawin”, Tesis, (Surabaya : Universitas Airlangga).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan., tanggal 19 Mei 2017.

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan Yudisial Review atas Pasal 29 ayat (1), (3), (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan pada Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016.

## **Wawancara**

Agusto Naur, praktisi hukum.

Antari Innaka, dosen hukum perjanjian.

Cornelia Siti, mantan karyawan dikantor notaris di Kota Z.

Grace, karyawan di kantor notaris di Kota Z.

Kevin Lee, Staff Biro Penjualan Rekanan *Strategic* Bank X.

Mustofa, notaris dikantor notaris di Kota Y.

Surach, dosen dibidang hukum perbankan.

Th. Endang Ratnawati, *Head Legal Adviser* Bank X.

Vina, Staff Biro Analisa Legalitas Kredit Bank X.

Widya, Staff Analisa Risiko Kredit Bank X.